

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin berkembang masa kini bukan sekedar mewujudkan era informasi global, namun memunculkan media telekomunikasi serta informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Pengaruh globalisasi terkait teknologi berdampak diberbagai aspek salah satunya dalam bidang manajemen. Perkembangan dan progres dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi mengharuskan masyarakat lebih kreatif, timbulnya berbagai media elektronik canggih di kehidupan masyarakat bermanfaat sebagai alat pengolah data yang mampu menciptakan informasi penting, sehingga memudahkan pegawai dalam mengakses informasi ataupun mengolah data. Banyak instansi pemerintah yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pelayanan publik, adanya teknologi internet masa kini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*. Penerapan SPBE atau *E-Government* dalam kelangsungan kerja pemerintah bersama pihak-pihak terkait bisa mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, seiring perkembangan zaman dalam peyelenggaraan pembangunan mengharuskan akselerasi dan efisiensi partisipasi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

*E-Government* harus dilakukan dengan serius juga konsisten agar menunjang transparansi pelayanan publik, yang perlu dipahami oleh pemerintah daerah bahwa penggunaan *E-Government* harus mengutamakan sistem pengawasan yang konsisten. Banyak Organisasi Perangkat Daerah yang sudah menerapkan *E-Government* salah satunya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Tanjungpinang untuk mempermudah suatu pekerjaan kantor agar produktivitas semakin tinggi dengan disiplinnya kinerja pegawai melalui software absensi agar pegawai disiplin dalam melakukan daftar kehadiran, sebab banyak aparatur yang sering keluar ketika jam kerja, korupsi waktu dan izin tanpa keterangan.

Sistem presensi adalah suatu bentuk pengawasan kedisiplinan yang sudah lama diterapkan berbagai instansi ada yang menggunakan absen manual, seperti absen kehadiran, dan absen dengan memasukan kertas ke dalam mesin. Akan tetapi sistem presensi manual mempunyai beberapa kekurangan antara lain presensi dapat dititipkan serta dimanipulasi yang berakibat pada pelanggaran disiplin kerja pegawai. Seiring perkembangan teknologi yang berdampak positif bagi instansi guna mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran kedisiplinan pegawai, penggunaan sistem presensi biometrik yang mengidentifikasi serta mengenali seseorang sesuai ciri fisik atau perilaku yang khas serta hanya dimiliki oleh dirinya sendiri seperti retina mata, sidik jari, struktur wajah, dan iris. Dengan sistem biometrik bisa diketahui tingkat kedisiplinan pegawai saat bekerja. Seluruhnya dapat diperhatikan dari jam kedatangan sampai jam pulang kerja. Pegawai mampu dinilai disiplin jika pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi, begitu juga sebaliknya jika tidak sesuai maka dinilai tidak disiplin.

Pemerintah Kota Tanjungpinang menerapkan SIAP Tanjungpinang (Sistem Informasi Aktivitas Presensi). SIAP merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan diadopsi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang serta dikhususkan pada urusan administrasi absensi elektronik ASN/THL/PTT/PNS dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Secara general hal ini termaktub dalam MOU antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di wilayah Kepulauan Riau Nomor 120.23/KDH.37/KB-01/2022 dan Nomor 181/1.1.02/8/MoU/2022 pada pasal 2 ayat (2) huruf d angka 3 tentang Kerjasama Antar Daerah, dan secara khusus penggunaan aplikasi SIAP tertuang dalam PKS antar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang Nomor 863/02/5.16/PKS/2022 Pasal 4 *jo* Pasal 5 ayat (2) huruf c dan d tentang penggunaan aplikasi SIAP. Dalam penggunaan aplikasi SIAP Tanjungpinang absen akan terekam secara online dan sistematis menggunakan media teknologi smartphone milik setiap pegawai, memudahkan presensi apel masuk dan pulang kerja.

SIAP Tanjungpinang diterapkan pada beberapa OPD sebagai *Pilot Project* pertama diantaranya Bappelitbang, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Diskominfo, BKPSDM, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kelurahan Pinang Kencana hal ini tertuang dalam SE Walikota Tanjungpinang Nomor 863/821/4.2.03/2022 tentang Uji Publik Aplikasi SIAP Tanjungpinang tanggal 21 Juni 2022, dan saat ini sudah 44 OPD Kota Tanjungpinang menggunakan Aplikasi SIAP Tanjungpinang, akan tetapi masih terdapat 16 OPD yang belum dapat

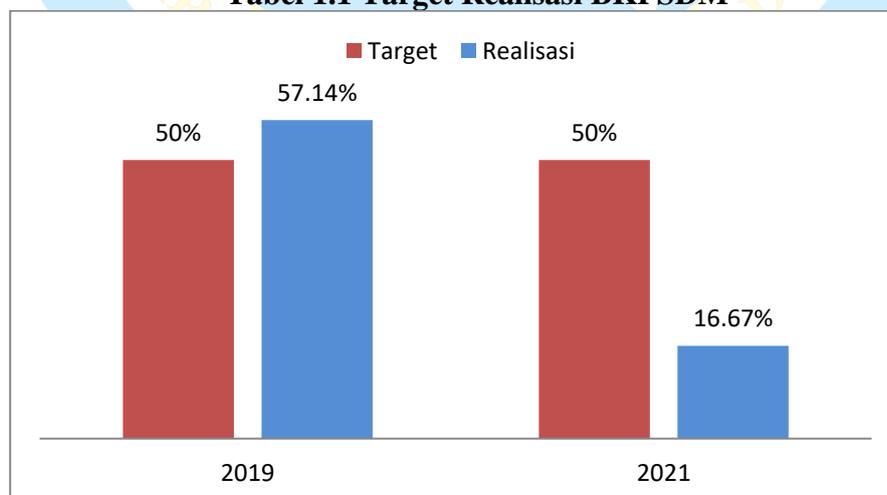
menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi SIAP Tanjungpinang di unduh melalui playstore dan sudah lebih dari 500 pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut, sebelum menginstal aplikasi pengguna wajib memastikan perangkat android yang akan di pakai mendukung dan sesuai ketentuan. Dalam penggunaan SIAP Tanjungpinang perlu memasukan swa foto kamera selfi, fitur titik koordinat GPS dan Google maps saat melakukan absensi.

Dalam pemakaian aplikasi ini pegawai tidak dapat pulang sebelum jamnya dan tidak bisa terlambat. Tingkat keamanan sistem ini sangat tinggi karena swa foto harus di upload sesuai titik koordinat OPD dan jam pegawai mengupload saat apel dan pulang terekam harus sesuai waktu yang ditentukan jika terlambat akan terdeteksi oleh aplikasi sehingga pegawai tidak dapat menitip dan memanipulasi absensi seperti yang dilakukan saat absensi manual sebelumnya, serta tidak bisa korupsi waktu atau izin tanpa alasan yang jelas.

Selanjutnya dari data pra penelitian, pada tanggal 18 januari 2021 terdapat 2 orang pegawai mendapat sanksi disiplin PNS dan terdapat usulan pemberhentian 2 pegawai dari jabatan administratif berdasarkan No.SP.20/165.2/4.2.02/2021. Dan berdasarkan data yang di dapatkan peneliti melalui media online Tribun Batam terdapat sembilan pegawai dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah diberikan sanksi disiplin secara final, tujuh diantaranya terlibat kasus Tidak Masuk Kantor dan telah diberhentikan pada 16 November 2021. (Sumber: <https://www.google.com/amp/s/batam.tribunnews.com/amp/2021/11/16/9-asn-di-pemko-tanjungpinang-diberhentikan-2-dianranya-terkena-kasus-pidana>).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Jam Kerja ASN di Lingkungan Kota Tanjungpinang Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b jumlah jam kerja efektif 5 hari kerja adalah 37,5 jam, Senin sampai Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB sedangkan Jumat 08.00 – 15.00 WIB untuk pelaksanaan solat Jum'at pukul 11.30 – 13.00 WIB. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan *database* Diskominfo Tanjungpinang, diketahui dari hasil rekap absensi pegawai secara manual pada 21 Oktober – 20 November 2021 terdapat 1 pegawai PTT izin disaat apel pagi, 21 November – 20 Desember 2021 terdapat 11 PNS, 7 Pegawai PTT, dan 6 Honor kantor yang melakukan izin saat apel pagi, serta 1 PTT tidak hadir tanpa keterangan, dan berdasarkan rekap 21 April – 20 Mei 2022 terdapat 1 PNS Cuti Alasan Penting, 4 pegawai honor kantor izin saat apel, rekap 20 Mei – 21 Juni 2022 terdapat 6 PNS izin apel, dan 1 honor kantor telah lebih dari 6 kali melakukan izin saat apel. Dari hasil rekap absensi dinas tersebut masih banyak pegawai yang sering melakukan izin di saat apel masuk.

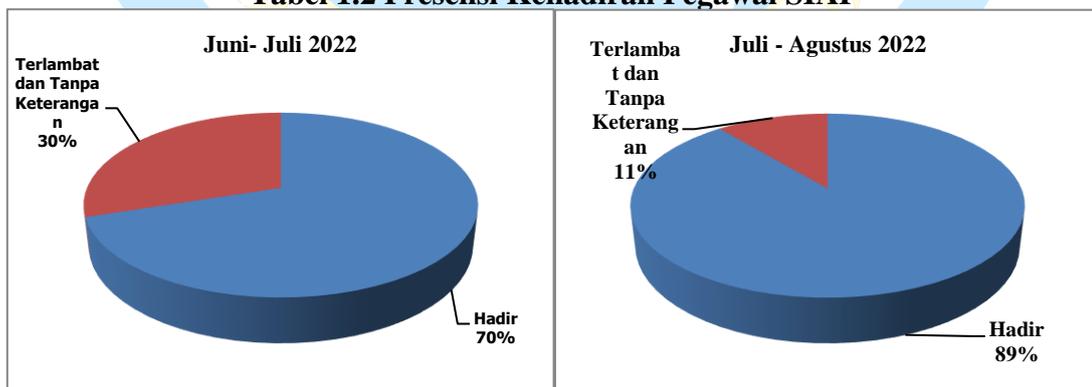
**Tabel 1.1 Target Realisasi BKPSDM**



Sumber: Data Lakip BKPSDM, 2019-2021

Untuk mengukur target realisasi indikator persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat) menggunakan rumusan indikator jumlah pegawai yang mendapat sanksi disiplin sedang dan berat tahun sebelumnya dikurangi sanksi disiplin sedang dan berat tahun berjalan dibagi jumlah sanksi sebelumnya di kali 100. Dapat dilihat pada grafik diatas tahun 2019 dinas menargetkan angka penurunan pelanggaran disiplin 50% dan realisasi penurunan tingkat pelanggaran disiplin sebesar 57,14% dengan artian pada tahun tersebut terjadi persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin melebihi target yang telah di tetapkan. Sedangkan di tahun 2021 persentase target penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur yaitu 50% dan yang terealisasi hanya 16,67% dengan artian terdapat selisih 33,34% masih belum terjadi penurunan tingkat pelanggaran disiplin karena banyak aparatur yang melanggar aturan disiplin pegawai. Namun berdasarkan presensi pegawai 21 Juni – 20 Juli 2022 dapat dilihat dari diagram bahwa terjadi penurunan tingkat pelanggaran disiplin pegawai akan tetapi masih banyak pegawai yang terlambat dan juga tidak hadir tanpa keterangan.

**Tabel 1.2 Presensi Kehadiran Pegawai SIAP**



Sumber: Data sekunder BKPSDM Tanjungpinang, 2022

Rekapan presensi tenaga kerja menjadi faktor krusial dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Informasi yang terperinci serta akurat mengenai kehadiran aparatur bisa menentukan prestasi, insentif, produktivitas, serta kemajuan organisasi pada umumnya. Melaksanakan suatu peraturan serta disiplin yang tinggi oleh setiap pegawai sesuai yang diterapkan pada organisasi pemerintahan ataupun birokrasi menjadi cara efektif untuk meningkatkan kualitas SDM. Birokrasi sebagai sistem kerja berdasarkan atas korelasi dan kolaborasi antara jabatan-jabatan secara langsung terkait persoalan formil menurut prosedur yang berlaku dan tanpa rasa sentiment, emosi, pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka hal tersebut guna mengorganisir suatu pekerjaan secara teratur yang dilakukan banyak orang, serta dalam pelaksanaan tanggungjawab harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Karakteristik birokrasi yaitu adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi secara keseluruhan, adanya peraturan yang ditaati, para pegawai bekerja dengan penuh perhatian sesuai kemampuan masing-masing, pegawai terikat oleh disiplin, pegawai diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan, serta adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi.

**Tabel 1.3 Rekap Absensi Pegawai Aplikasi SIAP**

Bulan	Keterangan										
	IP A	IDT	CT	S	DD	DL	CAP	ITMK	IPKSW	TK	I
Juni 2022	11	26	15	7	50	-	-	-	-	-	-
Juli 2022	108	55	57	39	46	-	5	-	6	1	2
Agustus 2022	-	-	10	10	23	7	-	22	21	16	-
<b>KETERANGAN :</b>											
IPA (Izin Pulang Awal), IDT (Izin Datang Terlambat), CAP (Cuti Alasan Penting), I (Izin), ITMK (Izin Terlambat Masuk Kerja)						CT (Cuti), S (Sakit), DD (Dinas Dalam), DL (Dinas Luar), TK (Tanpa Keterangan) IPKSW (Izin Pulang Sebelum Waktunya)					

Sumber: Database Diskominfo Tanjungpinang, 2022

Namun berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari BKPSDM Kota Tanjungpinang terkait rekapiulasi absensi manual terlihat bersih tidak ada yang tahu pegawai datang terlambat atau pulang lebih awal, tetapi disaat penggunaan aplikasi SIAP Tanjungpinang terlihat jelas data pegawai yang terlambat, pulang sebelum waktunya, sebagaimana data rekap absensi pegawai BKPSDM melalui SIAP Tanjungpinang diketahui pada bulan Juli 2022 terdapat sebanyak 26 kali pegawai terlambat masuk kantor, 3 pegawai pulang sebelum waktunya, sebanyak 97 kali pegawai absen tanpa keterangan, dan pada bulan Agustus 2022 terdapat sebanyak 19 kali beberapa pegawai terlambat, 2 pegawai pulang sebelum jamnya, serta sebanyak 116 kali pegawai absen tanpa keterangan. Dengan diterapkannya aplikasi SIAP Tanjungpinang membantu mempermudah pengontrolan serta otomatisasi sistem dalam melihat kinerja seluruh pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang. Dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kantor BKPSDM Kota Tanjungpinang, penerapan aplikasi SIAP Tanjungpinang sudah berjalan dengan baik, namun tak jarang masih terdapat banyak pegawai yang melanggar aturan instansi, seperti data absensi saat menggunakan Aplikasi SIAP terdapat pegawai yang meninggalkan kantor saat jam kerja, masih terdapat pegawai yang izin datang terlambat dan izin pulang awal, datang ke kantor hanya untuk melakukan absensi lalu meninggalkan kantor, serta dari penggunaan sistem aplikasi juga masih belum lancar terdapat hambatan diantaranya titik lokasi GPS yang tidak sesuai atau tidak terbaca, jaringan internet yang ngelag juga eror mengganggu sistem aplikasi, dan lainnya. Masalah disiplin pegawai ini menuntut pimpinan agar bersikap tegas dalam membuat

keputusan atas sanksi serta hukuman bagi pegawai yang melakukan pelanggaran. Dari uraian tersebut, maka peneliti ingin mengetahui **“Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Aktivitas Presensi (SIAP) Di Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah batasan masalah yang dibuat dalam penelitian. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Efektivitas Aplikasi SIAP Tanjungpinang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai dan perbaikan birokrasi?**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui efektivitas aplikasi SIAP Tanjungpinang dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dan perubahan birokrasi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari judul penelitian tersebut peneliti berharap agar dapat memberikan manfaat yang berarti baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan dan pengetahuan kepustakaan Ilmu Administrasi Negara,

khususnya pada mata kuliah Manajemen terkait manajemen sumber daya manusia dan inovasi sektor publik yang dibuat oleh pemerintah. Dan dapat dijadikan bahan referensi dan perbandingan bagi mahasiswa/I untuk penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Riset ini diharapkan bisa menjadi alternatif informasi, sumber referensi, dan sebagai sumber informasi awal bagi peneliti lainnya yang tertarik melihat efektivitas sistem aplikasi Sistem Informasi Aktivitas Presensi yang menjadi inovasi instansi pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai sejauh mana keefektifan pelaksanaan dan kegunaan aplikasi tersebut dalam mencapai keberhasilan peningkatan kedisiplinan pegawai serta profesionalitas pegawai di instansi pemerintah.

##### b. Bagi Organisasi

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta rekomendasi bagi Lembaga atau instansi serta *stakeholder* terkait yang menggunakan aplikasi tersebut agar dapat dijadikan masukan guna menyempurnakan sistem aplikasi guna peningkatan kinerja pegawai, kedisiplinan dan profesionalitas pegawai di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga mampu memberikan hasil yang produktif bagi instansi juga mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi tersebut.